

Jurnal ISSN : 1412-0348
RISALAH
JURNAL KAJIAN DAKWAH KOMUNIKASI DAN KEMASYARAKATAN

Volume 26, Edisi 2, November 2014

KOMUNIKASI ISLAM ANTARA PENGEMBANGAN ILMU DAN DAKWAH

**KOMUNIKASI PERSUASIF JAMA'AH TABLIGH DALAM PENGEMBANGAN DAKWAH
ISLAMIYYAH DI KOTA PEKANBARU**

Arwan

**PENGARUH MEKANISME CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP KINERJA
PERUSAHAAN**

Musfialdy

**RELASI GENDER DALAM MENINGKATKAN KECERDASAN EMOSIONAL ANAK DI
KELURAHAN SIDOMULYO BARAT KECAMATAN TAMPAN**

Rosmita

POLA KOMUNIKASI KOMUNITAS SUFI DI KOTA PEKANBARU

Toni Hartono-Masduki-Azni

**POLA REHABILITASI ISLAMI BAGI PECANDU NARKOBA DI BNN PROVINSI RIAU:
PERSPEKTIF KONSELING ISLAM**

Zul Amri-Yurnalis

MENGEFEKTIFKAN KOMUNIKASI PEMBANGUNAN ISLAM

Alaidin

**KEBERPIHAKAN MEDIA MASSA PADA PEMILU PRESIDEN 2014:
ANALISI WACANA KRITIS TERHADAP PEMBERITAAN MEDIA**

Amri Syarif Hidayat

**PERAN PEMERINTAH DALAM PEMBINAAN KEAGAMAAN WANITA TUNA SUSILA:
STUDI PERAN KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SIAK**

Zulkarnaini

Jurnal Risalah	Volume 26	Nomor 2	Halaman 1-109	November 2014	ISSN : 1412-0348
----------------	-----------	---------	---------------	---------------	------------------



UNIVERSITAS
ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

PENANGGUNG JAWAB

Dr. Yasril Yazid, MIS

REDAKTUR

Drs. Darusman, M.Ag

PENYUNTING

Amri Syarif Hidayat, M.Si

Rahmad, M.Pd

Rafdeadi, M.Si

Musfialdi, M.Si

Intan Kemala, M.Si

Zulkarnain, M.Ag

SEKRETARIAT

Surya El-Hadi

DESAIN & LAYOUT

Yudhi Martha Nugraha, M.Ds

Jurnal **RISALAH** adalah jurnal yang diterbitkan dua kali dalam setahun oleh Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau. Jurnal ini memuat tulisan tentang kajian dakwah, komunikasi dan kemasayarakat baik hasil pemikiran maupun penelitian.

Alamat Redaksi : Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau. Jl. HR. Soebrantas Km. 15 Panam Pekanbaru Riau.

Telp. 0761-3053592, Fax. 0761-21129.

Email : jurnalfdk@gmail.com.

PENGARUH MEKANISME *CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP KINERJA PERUSAHAAN

Musfialdi

Dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau

Email : musfialdi@gmail.com

Abstrak

Corporate Governance merupakan tata kelola perusahaan yang menjelaskan hubungan antara berbagai partisipan dalam perusahaan yang menentukan arah kinerja perusahaan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa dan memperoleh bukti empiris bahwa mekanisme *Corporate Governance* berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa: 1) Kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa kepemilikan saham oleh para pihak institusi tidak mampu meningkatkan Kinerja Perusahaan. 2) Kepemilikan manajerial tidak berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial bukan merupakan cara untuk meningkatkan Kinerja Perusahaan. 3) Komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah komite audit bukan merupakan jaminan untuk meningkatkan Kinerja Perusahaan. 4) Dewan komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa proporsi dewan komisaris independen dapat tidak memberikan perubahan terhadap Kinerja Perusahaan.

Kata kunci : *Corporate Governance*, Kinerja Perusahaan

Abstract

Corporate Governance explains the relationship between the various participants in a company that determines the direction of the company's performance. The purpose of this study was to analyze and obtain empirical evidence that *Corporate Governance* mechanisms affect the performance of the company. Based on the research results, it was concluded that: 1) Institutional ownership has no significant effect on the Company's performance. This suggests that stock ownership by the parties are not able to improve the institutional performance of the Company. 2) Managerial ownership has no significant effect on the Company's performance. This suggests that managerial ownership is not a way to improve the Company's performance. 3) The audit committee has no significant effect on company performance. This indicates that the number of audit committee is not necessarily a guide to improve the Company's performance. 4) Independent directors of the Board have a significant effect on the Company's performance. This shows that the proportion of independent board can not provide changes to the Company's performance.

Keywords : *Corporate Governance and Performance*

Pendahuluan

Tujuan penting dari suatu perusahaan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan pemiliknya atau owner melalui peningkatan nilai perusahaan. Peningkatan nilai perusahaan tersebut dapat dicapai apabila perusahaan mampu beroperasi dan mencapai laba yang ditargetkan. Dengan tercapainya laba yang ditargetkan maka perusahaan akan dinilai memiliki kinerja yang baik. Melalui laba yang diperoleh tersebut perusahaan akan mampu memberikan deviden kepada pemegang saham, meningkatkan pertumbuhan pertumbuhan perusahaan, dan mempertahankan kelangsungan hidupnya¹.

Corporate Governance merupakan tata kelola perusahaan yang menjelaskan hubungan antara berbagai partisipan dalam perusahaan yang menentukan arah kinerja perusahaan. Melalui penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) tersebut diharapkan: (1) perusahaan mampu meningkatkan kinerjanya melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi operasional perusahaan, serta mampu meningkatkan pelayanannya kepada stockholders, (2) perusahaan lebih mudah memperoleh dana pembiayaan yang lebih murah sehingga dapat meningkatkan corporate value, (3) mampu meningkatkan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia dan (4) pemegang saham akan merasa puas dengan kinerja perusahaan sekaligus akan meningkatkan shareholders value dan deviden.

Isu mengenai *Corporate Governance* mulai mengemuka, khususnya di Indonesia pada tahun 1998 ketika Indonesia mengalami krisis yang berkepanjangan. Banyak pihak yang mengatakan lamanya proses perbaikan di Indonesia disebabkan oleh sangat lemahnya *Corporate Governance* yang diterapkan dalam perusahaan di Indonesia. Tahun 2008 dan 2009 merupakan tahun-tahun yang penuh tantangan bagi ekonomi dunia. Pada kedua tahun tersebut pertumbuhan ekonomi dunia menurun dari 4,9% pada tahun 2007 menjadi 3,7% pada tahun 2008 dan 3,8% pada tahun 2009. Indonesia merupakan negara yang masih sangat bergantung dengan aliran dana dari investor asing, dengan adanya krisis global ini secara otomatis para investor asing tersebut menarik dananya dari Indonesia. Hal ini yang berakibat jatuhnya nilai mata uang kita. Aliran dana asing yang tadinya akan digunakan untuk pembangunan ekonomi dan untuk menjalankan perusahaan-perusahaan hilang, banyak perusahaan menjadi tidak berdaya yang pada ujungnya negara kembalilah yang harus menanggung hutang perbankan dan perusahaan swasta.

Dari fenomena di atas penerapan *Corporate Governance* diharapkan dapat meningkatkan efektifitas manajemen dalam pengambilan keputusan dimana pihak manajemen dapat menciptakan kondisi yang baik, efisien dan menguntungkan bagi perusahaan. Akibat adanya penyampaian penyajian informasi yang tidak transparan akan menjadi penghalang bagi perusahaan untuk menerapkan *Corporate Governance*.

Terbentuknya suatu kepercayaan investor dan masuknya arus modal didorong oleh penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) yang akan

¹ Yudha Pranata, Pengaruh Penerapan GCG Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan, (Yogyakarta: UII, 2007), h.21.

menciptakan insentif internal yang efektif bagi manajemen perusahaan dan penggunaan sumber daya yang efisien sehingga akan berdampak pulihnya perekonomian baik secara makro maupun mikro. Agar kelangsungan hidup perusahaan dapat terus dipertahankan maka sangat perlu bagi perusahaan untuk menerapkan strategi-strategi yang sesuai dengan kondisi saat ini untuk meningkatkan kinerja perusahaan atau mempertahankan kinerja perusahaan yang sudah dicapai. Untuk mengetahui kinerja suatu perusahaan perlu dilakukan suatu penilaian atau pengukuran. Fungsi dari penilaian atau pengukuran kinerja adalah sebagai alat bantu bagi manajemen dalam proses pengambilan keputusan, juga untuk memperlihatkan kepada investor maupun pihak-pihak yang berkepentingan bahwa perusahaan memiliki kredibilitas yang baik.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keterkaitan *Corporate Governance* yang diterapkan dalam suatu perusahaan dengan kinerja perusahaan yang bersangkutan. Menurut Jensen dan Meckling kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional adalah dua mekanisme dalam penerapan *Corporate Governance* utama yang membantu mengendalikan masalah keagenan (*agency conflict*). Crutchley dan Hansen, Bathala, et al dalam Faisal menyimpulkan bahwa kepemilikan institusional yang tinggi dapat digunakan untuk mengurangi masalah keagenan. Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham oleh pemerintah, institusi keuangan, institusi berbadan hukum, institusi luar negeri, dana perwalian serta institusi lainnya pada akhir tahun.

Penelitian mengenai pengaruh kepemilikan institusional terhadap *agency costs* dilakukan oleh Crutchley et al. Crutchley menyatakan bahwa kepemilikan oleh institusional juga dapat menurunkan *agency costs*, karena dengan adanya monitoring yang efektif oleh pihak institusional menyebabkan penggunaan utang menurun. Hal ini karena peranan utang sebagai salah satu alat monitoring sudah diambil alih oleh kepemilikan institusional. Dengan demikian kepemilikan institusional dapat mengurangi *agency cost of debt*.

Kepemilikan manajerial merupakan kepemilikan saham oleh manajemen perusahaan yang diukur dengan persentase jumlah saham yang dimiliki oleh manajemen (Sujono dan Soebiantoro, 2007). Menurut Mehran et al., kepemilikan saham manajerial adalah proporsi saham biasa yang dimiliki oleh para manajemen.

Proporsi jumlah kepemilikan manajerial dalam perusahaan dapat mengindikasikan ada kesamaan kepentingan antara manajemen dengan pemegang saham. Peningkatan proporsi saham yang dimiliki manajer dan direksi akan menurunkan kecenderungan adanya tindakan manipulasi yang berlebihan, sehingga dapat menyatukan kepentingan antara manajer dan pemegang saham. Menurut Faisal, besar kecilnya jumlah kepemilikan saham manajerial dalam perusahaan dapat mengindikasikan adanya kesamaan (*congruence*) kepentingan antara manajemen dengan *shareholders*. Semakin meningkatnya proporsi kepemilikan manajerial maka akan semakin baik kinerja perusahaan. Sehingga manajer akan termotivasi untuk meningkatkan kinerjanya yang juga merupakan keinginan dari para pemegang saham.

Dalam rangka pelaksanaan tata kelola perusahaan (*Corporate Governance*) yang baik, Bursa Efek Indonesia (BEI) mengeluarkan peraturan tanggal 1 Juli

2001, yang mengatur tentang pembentukan dewan komisaris independen dan komite audit. Menurut Egon Zehnder dalam FCGI (2001), dewan komisaris merupakan inti dari *Corporate Governance* yang ditugaskan untuk menjamin pelaksanaan strategi perusahaan, mengawasi manajemen dalam mengelola perusahaan serta mewajibkan terlaksananya akuntabilitas. Beberapa penelitian telah membuktikan adanya hubungan negatif antara dewan komisaris dengan manajemen laba.

Keberadaan komite merupakan usaha perbaikan terhadap cara pengelolaan perusahaan terutama cara pengawasan terhadap manajemen perusahaan. Hal ini disebabkan karena komite audit akan menjadi penghubung antara manajemen perusahaan dengan dewan komisaris maupun pihak eksternal lainnya. Defonnd dan Jiambalvo menemukan bahwa perusahaan yang melaporkan laba yang lebih tinggi dari seharusnya adalah perusahaan tersebut tidak memiliki komite audit. Hasil penelitian Beasley tidak menemukan hubungan statistik antara keberadaan komite audit dan kecenderungan kecurangan pelaporan keuangan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka yang menjadi perumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Apakah mekanisme *Corporate Governance* berpengaruh terhadap kinerja perusahaan ?

Berkaitan dengan latar belakang dan perumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa dan memperoleh bukti empiris bahwa mekanisme *Corporate Governance* berpengaruh terhadap kinerja perusahaan.

Adapun manfaat dari penelitian ini diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat untuk menambah pengetahuan mengenai *Corporate Governance* dan kinerja perusahaan, kontribusi praktis yang dapat diberikan kepada perusahaan, investor adalah beberapa masukan dan saran dalam rangka pengambilan keputusan-keputusan dengan sistem-sistem yang ada dalam perusahaan.

Bagi Akademisi, bahan referensi untuk penulis selanjutnya. Menambah khasanah ilmu pengetahuan yang ingin mengembangkan penelitian dengan topik-topik yang berkaitan dengan *Corporate Governance* dan masalah lain yang berkaitan dengan kinerja perusahaan.

Kajian Teori

Kinerja Perusahaan Istilah kinerja berasal dari kata job performance atau octuol performance, artinya prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya yang dicapai oleh seseorang. Kata *performance* itu sendiri merupakan kata benda yang dimana salah satunya adalah sesuatu hasil yang dikerjakan. Adapun salah satu arti dari entries tersebut adalah :

1. Melakukan, menjalankan dan melaksanakan.
2. Memenuhi atau menjalankan kewajiban suatu nazar.
3. Melaksanakan atau menyempurnakan tanggung jawab.
4. Melakukan sesuatu yang diharapkan oleh seseorang.

Menurut Sulistiyani (2003:223), kinerja seseorang merupakan kombinasi dari kemampuan, usaha, dan kesempatan yang dapat dinilai dari hasil kerjanya.

Sedangkan menurut Bernardin dan Russel menyatakan bahwa kinerja merupakan catatan outcome yang dihasilkan dari fungsi pegawai tertentu atau kegiatan yang dilakukan selama periode waktu tertentu. Sulistiyani dan Rosidah menyatakan kinerja seseorang merupakan kombinasi dari kemampuan, usaha, dan kesempatan yang dapat dinilai dari hasil kerjanya. Secara definitif Bernardin dan Russell juga mengemukakan kinerja adalah suatu hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya yang didasarkan atas kecakapan, pengalaman, dan kesungguhan, serta waktu.

Dale Yoder dalam Hasibuan mendefinisikan penilaian kinerja merupakan prosedur yang formal dilakukan di dalam organisasi untuk mengevaluasi pegawai dan sumbangan serta kepentingan bagi pegawai. Sedangkan menurut Anwar Prabu Mangku Negara, kinerja atau prestasi kinerja mempunyai pengertian hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang pegawai di organisasi dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.

Berdasarkan hal tersebut di atas maka arti performance atau kinerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam rangka upaya mencapai tujuan lembaga yang bersangkutan sesuai dengan moral dan etika.

Kinerja perusahaan adalah suatu tampilan keadaan secara utuh atas perusahaan selama periode waktu tertentu, merupakan hasil atau prestasi yang dipengaruhi oleh kegiatan operasional perusahaan dalam memanfaatkan sumber daya (sumber daya yang dimiliki). Kinerja perusahaan merupakan penentuan ukuran-ukuran tertentu yang dapat mengukur keberhasilan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba. Menurut Febryani dan Zulfadin dalam Cornelius (2007) kinerja perusahaan merupakan hal penting yang harus dicapai oleh setiap perusahaan dimana pun, karena kinerja merupakan cerminan dari kemampuan perusahaan dalam mengelola dan mengalokasikan sumber dayanya. Kinerja perusahaan adalah kemampuan perusahaan dalam menjelaskan operasionalnya.

Semakin besar nilai rasio Tobin's Q menunjukkan bahwa perusahaan memiliki prospek pertumbuhan yang baik dan memiliki intangible asset yang semakin besar. Hal ini bisa terjadi karena semakin besar nilai pasar aset perusahaan, semakin besar kerelaan investor untuk mengeluarkan pengorbanan yang lebih untuk memiliki perusahaan tersebut. Brealey dan Myers menyebutkan bahwa perusahaan dengan nilai Tobin's Q yang tinggi biasanya memiliki brand image perusahaan yang sangat kuat.

Sedangkan perusahaan yang memiliki nilai Tobin's Q yang rendah umumnya berada pada industri yang sangat kompetitif atau industri yang mulai mengecil.

Teori Keagenan

Perspektif hubungan keagenan merupakan dasar yang digunakan untuk memahami *Corporate Governance*. Jensen dan Meckling menyatakan bahwa hubungan keagenan adalah sebuah kontrak antara manajer dengan investor. Konflik kepentingan antara pemilik dan agen terjadi karena kemungkinan agen tidak selalu berbuat sesuai dengan kepentingan principal, sehingga memicu biaya

keagenan. Sebagai agen, manajer secara moral bertanggung jawab untuk mengoptimalkan keuntungan para pemilik (principal) dan sebagai imbalannya akan memperoleh kompensasi sesuai dengan kontrak. Dengan demikian terdapat dua kepentingan yang berbeda didalam perusahaan dimana masing-masing pihak berusaha untuk mencapai atau mempertahankan tingkat kemakmuran yang dikehendaki (Ali, 2002).

Eisenhardt (1999) menyatakan bahwa teori agensi menggunakan tiga asumsi sifat manusia yaitu: (1) manusia pada umumnya mementingkan diri sendiri, (2) manusia memiliki daya pikir terbatas mengenai persepsi masa mendatang, dan (3) manusia selalu menghindari resiko. Berdasarkan asumsi sifat dasar manusia tersebut manajer sebagai manusia akan bertindak *opportunistic*, yaitu mengutamakan kepentingan pribadinya (Haris, 2004).

Manajer sebagai pengelola perusahaan lebih banyak mengetahui informasi internal dan prospek perusahaan di masa yang akan datang dibandingkan pemilik (pemegang saham). Manajer berkewajiban memberikan sinyal mengenai kondisi perusahaan kepada pemilik. Sinyal yang diberikan dapat dilakukan melalui pengungkapan informasi akuntansi seperti laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut penting bagi para pengguna eksternal terutama sekali karena kelompok ini berada dalam kondisi yang paling ketidakpastiannya (Ali, 2002).

Corporate Governance besar yang merupakan konsep yang didasarkan pada teori keagenan, diharapkan bisa berfungsi sebagai alat untuk memberikan keyakinan kepada para investor bahwa mereka akan menerima return atas dana yang telah mereka investasikan. Selain itu *Corporate Governance* juga berkaitan dengan bagaimana para investor yakin bahwa manajer akan memberikan keuntungan bagi mereka, yakin bahwa manajer tidak akan mencuri/menggelapkan atau menginvestasikan ke dalam proyek-proyek yang tidak menguntungkan berkaitan dengan dana/kapital yang telah ditanamkan oleh investor, dan berkaitan dengan bagaimana para investor mengontrol para manajer (Shleifer dan Vishny, 1997). Dengan kata lain *Corporate Governance* diharapkan dapat berfungsi untuk menekan atau menurunkan biaya keagenan (*Agency cost*).

Good Corporate Governance: Definisi *Good Corporate Governance* pertama kali diperkenalkan oleh Cadbury Committee pada tahun 1992 (Wilson Arafat, 2006:6). Setelah dikenalkan oleh Cadbury Comittee, berkembanglah berbagai definisi yang berhubungan dengan GCG.

Menurut CeBISS (Lembaga Independent Research Dependen & Publication for Business Development, 2001), GCG merupakan kelanjutan dari *agency theory* yang dalam tatanan empiris kurang memadai untuk digunakan sebagai alat menyelenggarakan perusahaan modern, dimana terdapat ciri yang menonjol terpisahnya kepemilikan dengan pengelolaan serta digunakannya sebagai dana pinjaman selain dengan dana dari pesaham, sehingga dibutuhkanlah GCG (Wilson Arafat, 2006:6).

FCGI (Forum for *Corporate Governance*) menyatakan GCG adalah seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta pemegang saham internal maupun pemegang saham eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka. GCG merupakan suatu sistem,

proses, dan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara berbagai pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) terutama perangkat untuk mencapai tujuan dan pengawasan atas kinerja. Menurut Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor KEP 117/M-MBU 2002, *Corporate Governance* adalah suatu proses dari struktur yang digunakan oleh organ BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memerhatikan kepentingan *stakeholder* lainnya, berlandaskan peraturan perundangan dan nilai-nilai etika. (Indra Surya, Ivan, 2008:25).

Dari berbagai definisi diatas dapat disimpulkan bahwa GCG merupakan suatu mekanisme, modal, dan proses yang mengatur hubungan antara para pemegang saham (*shareholder*), dan pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholder*), dan pemerintah (*government*) untuk mencapai tujuan tertentu.

1. Prinsip *Corporate Governance*

Prinsip-prinsip yang diberlakukan oleh Organisation for Economic Corporation and Development (OECD) yang mencakup lima bidang:

- a. Perlindungan terhadap hak-hak pemegang saham. Kerangka yang dibangun dalam GCG harus mampu melindungi hak-hak para pemegang saham.
- b. Persamaan perlakuan terhadap seluruh pemegang saham. Seluruh pemegang saham harus memiliki kesempatan mendapatkan penggantian atau perbaikan atas pelanggaran dari hak-hak mereka.
- c. Peranan *stakeholder* yang terkait dengan perusahaan. Kerangka GCG harus memberikan pengakuan terhadap hak-hak *stakeholder*, seperti yang ditentukan undang-undang, dan mendorong kerja sama aktif antara perusahaan dan *stakeholder* dalam rangka menciptakan kesejahteraan, lapangan kerja kesinambungan usaha.
- d. Keterbukaan. dan transparansi. Kerangka GCG menjamin adanya pengungkapan yang tepat waktu dan akurat untuk setiap permasalahan yang berkaitan dengan perusahaan.
- e. Akuntabilitas dewan komisaris. Kerangka GCG harus menjamin adanya pedoman strategi perusahaan, pemantauan yang efektif terhadap manajemen yang dilakukan oleh dewan komisaris, dan akuntabilitas dewan komisaris terhadap pemegang saham dan perusahaan.

FCGI (2001) menyebutkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. *Fairness* (Keadilan)
Perlakuan yang sama terhadap para pemegang saham, terutama kepada pemegang saham minoritas dan pemegang saham asing, serta menjamin terlaksananya komitmen dengan para investor. prinsip *fairness* diharapkan untuk membuat seluruh aset perusahaan dikelola secara baik dan hati-hati sehingga terdapat perlindungan terhadap kepentingan pemegang saham secara jujur dan adil.
- b. *Transparency* (Transparansi).
Transparency mewajibkan adanya suatu informasi yang terbuka, tepat waktu, jelas dan dapat diperbandingkan yang menyangkut keadaan keuangan, pengelolaan perusahaan dan kepemilikan perusahaan.
- c. *Accountability* (Akuntabilitas).

Prinsip *accountability* menjelaskan peran dan tanggung jawab, serta mendukung usaha untuk menjamin penyeimbangan kepentingan manajemen dan pemegang saham, sebagai mana yang diawasi oleh dewan komisaris.

d. *Responsibility* (Tanggung Jawab).

Responsibility memastikan dipatuhinya ketentuan yang berlaku sebagai cerminan yang dipatuhinya nilai-nilai sosial. Penerapan prinsip ini diharapkan membuat perusahaan menyadari bahwa dalam kegiatan operasionalnya sering kali menghasilkan eksternalitas (dampak diluar perusahaan) negatif yang harus ditanggung oleh masyarakat.

Mekanisme *Corporate Governance*:

1. Kepemilikan Institusional

Kepemilikan Institusional merupakan kepemilikan saham oleh pemerintah, institusi keuangan, institusi berbadan hukum, institusi luar negeri, dana perwalian serta institusi lainnya pada akhir tahun (Shien, et.al, 2006) dalam Anindhita, 2009). Menurut Wening (2007), kepemilikan institusional merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kinerja perusahaan. Adanya kepemilikan oleh investor institusional akan mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal terhadap kinerja manajemen, karena kepemilikan saham mewakili suatu sumber kekuasaan yang dapat digunakan untuk mendukung atau sebaliknya terhadap kinerja manajemen

Brous dan Kini (1994) menyatakan bahwa ketatnya pengawasan yang dilakukan oleh investor institusional sangat tergantung pada besarnya investasi yang dilakukan. Bathala et al., (1994) juga menemukan bahwa kepemilikan institusional menggantikan kepemilikan manajerial dalam mengontrol *agency cost*. Semakin besar kepemilikan oleh institusi keuangan maka akan semakin besar kekuatan suara dan dorongan institusi keuangan untuk mengawasi manajemen dan akibatnya akan memberikan dorongan yang lebih besar untuk mengoptimalkan nilai perusahaan sehingga kinerja perusahaan juga akan meningkat.

2. Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan manajerial merupakan kepemilikan saham oleh manajemen perusahaan yang diukur dengan persentase jumlah saham yang dimiliki oleh manajemen (Sujono dan Soebianto, 2007). Menurut Mehran et al., (1992) dalam Anindhita, 2009) kepemilikan saham manajerial adalah proporsi saham biasa yang dimiliki oleh para manajemen. Menurut Itturiaga dan Sanz (2000) struktur kepemilikan manajerial dapat dijelaskan dari dua sudut pandang yaitu pendekatan keagenan (*agency approach*) dan pendekatan ketidakseimbangan (*asymmetric information approach*).

Pendekatan keagenan menganggap struktur kepemilikan manajerial sebagai sebuah instrument atau alat untuk mengurangi konflik keagenan diantara beberapa klaim (*claimholder*) terhadap perusahaan.

Pendekatan ketidakseimbangan informasi memandang mekanisme struktur kepemilikan manajerial sebagai suatu cara untuk mengurangi ketidakseimbangan informasi antara *insider* dan *outsider* melalui pengungkapan informasi di dalam

pasar modal. Gunarsih (2004) menyatakan bahwa kepemilikan perusahaan merupakan salah satu dipergunakan agar mekanisme yang dapat pengelola melakukan aktivitas sesuai dengan kepentingan pemilik perusahaan.

Meningkatkan kepemilikan manajerial dapat digunakan sebagai cara untuk mengatasi masalah keagenan. Manajer akan termotivasi untuk meningkatkan kinerjanya yang juga merupakan keinginan dari para pemegang saham, Ross et. al (2004) dalam Putri (2006) menyatakan bahwa semakin besar proporsi kepemilikan saham pada perusahaan maka manajemen cenderung berusaha lebih giat untuk kepentingan pemegang saham yang tidak lain adalah dirinya sendiri.

Kepemilikan saham manajerial akan membantu penyatuan kepentingan antara manajer dan pemegang saham, sehingga manajer ikut merasakan secara langsung manfaat dari keputusan yang diambil dan ikut pula menanggung kerugian sebagai konsekuensi dari pengambilan keputusan yang salah.

3. Komite Audit

Untuk dapat menciptakan sistem *Corporate Governance* yang baik pada perusahaan publik di Indonesia, maka akuntabilitas dewan komisaris yang selama ini diragukan harus ditingkatkan, antara lain dengan cara membentuk komisaris independen dan komite audit (Apriyanti dan Juliarto, 2006). Hubungan antara jumlah anggota dewan komisaris dengan nilai perusahaan didukung oleh perspektif fungsi service dan kontrol yang dapat diberikan oleh dewan. Karena kedua fungsi tersebut lebih cenderung diberikan oleh dewan komisaris untuk kondisi struktur *Corporate Governance*. Fungsi service menyatakan bahwa komisaris dapat memberikan konsultasi dan nasihat kepada manajemen (dan direksi) (Darwis 2009).

4. Komisaris Independen

Komisaris independen merupakan salah satu mekanisme *Corporate Governance*. Dewan komisaris berperan dalam menjalankan fungsi pengawasan, komposisi dewan dapat mempengaruhi pihak manajemen dalam menyusun laporan keuangan sehingga dapat diperoleh suatu laporan laba yang berkualitas (Boediono, 2005).

Komisaris independen merupakan representasi dari kepentingan *minority interest*. Keberadaan komisaris independen dimaksudkan untuk melindungi mereka dari kemungkinan terjadinya asimetri informasi dan tindakan oportunistik manajemen.

Menurut UU No. 40 Tahun 2001 pada Penjelasan Pasal 120 ayat (2), Komisaris Independen yang ada di dalam pedoman tata kelola Perseroan yang baik (*Code of Good Corporate Governance*) adalah "Komisaris dari pihak luar". Dalam UU No. 40 Tahun 2007 Pasal 120 ayat (1) dan (2) menerangkan bahwa Anggaran dasar Perseroan dapat mengatur adanya 1 (satu) orang atau lebih Komisaris Independen dan 1 (satu) orang Komisaris Utusan. Komisaris independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat berdasarkan keputusan RUPS dari pihak yang tidak terafiliasi dengan pemegang saham utama, anggota Direksi independen dan/atau anggota Dewan Komisaris Lainnya.

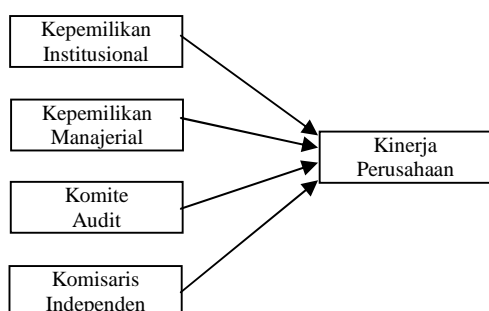
Keberadaan komisaris independen di Indonesia telah diatur dalam Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta (BEJ) Nomor: Kep 315/BEJ/06-2000 perihal Peraturan No I-A, tentang Pencatatan Saham dan Efek bersifat Ekuitas selain Saham yang diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat pada butir mengenai Ketentuan tentang Komisaris Independen. Dalam peraturan tersebut dinyatakan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pengelolaan perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*), perusahaan yang tercatat di BEJ wajib memiliki komisaris independen yang jumlah proporsionalnya sebanding dengan jumlah saham yang dimiliki oleh bukan pemegang saham pengendali dengan ketentuan jumlah komisaris independen sekurang-kurangnya 30% dari jumlah seluruh anggota komisaris.

Beberapa kriteria lainnya tentang komisaris independen adalah sebagai berikut (FCGI, 2006):

1. Komisaris independen tidak memiliki hubungan afiliasi dengan pemegang saham mayoritas atau pemegang saham pengendali (*controlling shareholders*) perusahaan tercatat yang bersangkutan;
2. Komisaris independen tidak memiliki hubungan dengan direktur dan/atau komisaris independen tidak memiliki kedudukan rangkap pada perusahaan lainnya yang terafiliasi dengan Perusahaan Tercatat yang bersangkutan;
3. Komisaris independen harus mengerti peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal;
4. Komisaris independen diusulkan dan dipilih oleh pemegang saham minoritas yang bukan merupakan pemegang saham pengendali (bukan *controlling shareholders*) dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) komisaris lainnya Perusahaan Tercatat yang bersangkutan.

Model Penelitian

Adapun model dalam penelitian ini adalah:
Variabel Independen dan Variabel Dependen



Hipotesis

Hipotesis yang diajukan adalah:

- H1: Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap Kinerja Perusahaan
- H2: Kepemilikan Manajerial berpengaruh terhadap Kinerja Perusahaan
- H3: Komite Audit berpengaruh terhadap Kinerja Perusahaan
- H4: Komisaris Independen berpengaruh terhadap Kinerja Perusahaan

Target populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan-perusahaan yang merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain).

Data yang diambil untuk penelitian ini diperoleh dari laporan keuangan perusahaan LQ 45 periode 2010- 2012 dan profil perusahaan yang berisikan tentang kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, komite audit, komisaris independen.

Penelitian ini menggunakan analisis Regresi Linear Berganda. Regresi merupakan suatu alat ukur yang digunakan untuk melihat ada atau tidaknya korelasi antar variabel. Regresi Linear Berganda adalah regresi dimana variabel terikatnya dihubungkan atau dijelaskan lebih dari satu variabel bebas, namun masih menunjukkan diagram hubungan yang linear.

Regresi Linear berganda dihitung dengan menggunakan rumus :

$$\text{Tobin's } Q = \alpha + \beta_1 \text{NST} + \beta_2 \text{MGR} + \beta_3 \text{KA} + \beta_4 \text{KI} + e$$

Dimana:

Tobin's Q = Ukuran kinerja perusahaan yang diukur dengan menggunakan *Tobin's Q* sebagai ukuran kinerja pasar

α = Konstanta

$\beta_1 - \beta_4$ = Koefisien Regresi

INST = Presentasi Kepemilikan Saham oleh Institusional

MGR = Persentase Kepemilikan Saham oleh Manajerial

KA = Komite Audit

KI = Komisaris Independen

e = error

Secara teoritis model yang digunakan dalam penelitian ini akan menghasilkan nilai parameter penduga yang sah bila memenuhi asumsi normalitas, dan tidak terjadi autokorelasi, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas, jadi pengujian asumsi klasik yang akan diuji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Analisa Dan Pembahasan

Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif bertujuan untuk mengetahui modus, median, nilai rata-rata (mean), nilai maksimum, dan nilai minimum.

Tabel 1
Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Kepemilikan Institusional	45	.18	.85	.6349	.17327
Kepemilikan Manajerial	45	.000000	.000520	.00006867	.000138081
Komite Audit	45	.20	1.00	.7782	.24094
Komisaris Independen	45	.17	.75	.4244	.12467
Kinerja Perusahaan	45	.30	1.91	.8402	.40645

Sumber: data diolah dengan program SPSS 16.0

Variabel kepemilikan saham oleh pihak institusional (X1) menunjukkan nilai minimum sebesar 1,8% dan nilai maximum sebesar 85%. Kepemilikan institusional secara rata-rata diperoleh sebesar 63,49% dengan standar deviasi sebesar 0,17327. Hal ini berarti bahwa pihak institusional perusahaan memiliki 63,49% dari seluruh saham perusahaan. Para pihak institusional memiliki pengaruh yang besar dalam mempengaruhi segala keputusan yang berkaitan dengan kinerja operasi perusahaan.

Berdasarkan tabel di atas, variabel kepemilikan manajerial (X2) memiliki nilai minimum sebesar 0% dan nilai maksimum sebesar 0,052%. Selain itu, nilai rata-ratanya adalah sebesar 0,006867% dengan standar deviasi sebesar 0,000138081. Hal ini berarti manajer perusahaan memiliki 0,006867% dari seluruh saham perusahaan yang beredar. Kepemilikan saham oleh manajer yang jumlahnya relatif kecil tidak dapat mempengaruhi pengambilan keputusan yang dilakukan oleh perusahaan dalam pelaporan keuangan perusahaan.

Variabel komite audit (X3) yang memiliki background keahlian keuangan mempunyai nilai minimum sebesar 20% dan nilai maximum sebesar 100%. Nilai rata-rata dari variabel tersebut adalah 77,82% dengan standar deviasi 0,24094. Dari data di Lampiran 1 dapat dilihat bahwa seluruh perusahaan mempunyai anggota komite sebesar atau lebih dari 3 orang. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan sampel telah memenuhi kriteria yang telah ditetapkan BAPEPAM yang mewajibkan jumlah minimal komite audit dalam suatu perusahaan adalah sebesar 3 orang. Berdasarkan jumlah tersebut pengawasan terhadap kinerja pelaporan keuangan perusahaan lebih terjamin dan mengurangi resiko kecurangan.

Variabel dewan komisaris independen (X4) mempunyai nilai minimum sebesar 17% dan nilai maximum sebesar 75%. Komisaris independen secara rata-rata diperoleh sebesar 0,4244 dengan standar deviasi sebesar 0,12467. Hal ini berarti bahwa perusahaan memiliki komisaris independen dengan proporsi sebesar 0,12467 dari seluruh jumlah anggota dewan komisaris yang ada. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada beberapa perusahaan sampel yang belum memenuhi peraturan BAPEPAM yang mewajibkan persentase keberadaan dewan komisaris independen adalah 30% dalam dewan. Jumlah komisaris independen yang besar diperlukan dalam perusahaan sebagai kontrol terhadap kebijakan perusahaan.

Variabel Kinerja Perusahaan (Y) yang diukur dengan menggunakan Tobin's Q menunjukkan nilai minimum sebesar 0,30 dan nilai maksimum sebesar 1,91. Nilai rata-rata variabel ini adalah sebesar 0,8402 dengan standar deviasi sebesar 0,40645. Hal ini berarti bahwa rata-rata Kinerja Perusahaan dianggap tidak menarik, karena rasio Q di bawah satu. Pada umumnya investor lebih memilih perusahaan yang memiliki rasio Q di atas satu, karena hal itu menunjukkan bahwa investasi dalam aktiva menghasilkan laba yang memberikan nilai yang lebih tinggi daripada pengeluaran investasi sehingga investasi menjadi menguntungkan.

Uji Asumsi Klasik

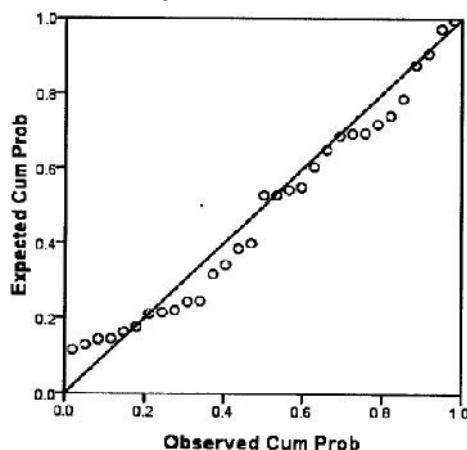
Suatu regresi dinyatakan baik apabila pada suatu regresi tidak terdapat data yang ekstrim. Uji asumsi klasik bertujuan untuk melihat apakah model yang

digunakan dalam penelitian ini mengalami masalah. Uji asumsi klasik dilakukan sebelum dilakukan uji regresi.

1. Uji Normalitas

Pengujian ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah data berdistribusi normal atau tidak. Berikut ini adalah hasilnya:

Gambar 1
Uji Normalitas



Sumber: Gambar diolah dengan SPSS 16.0

Berdasarkan Gambar 1, dapat dilihat bahwa titik-titik menyebar di sekitar garis diagonal dan penyebarannya mengikuti arah garis diagonal. Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa data berdistribusi normal atau memenuhi asumsi normalitas.

Uji normalitas data juga dapat dilakukan dengan menggunakan uji statistik non-parametrik *Kolmogorov-Smirnov*. Uji ini dilakukan dengan melihat apakah distribusi data mempunyai perbedaan yang signifikan atau tidak dengan nilai standar baku. Jika terdapat perbedaan yang signifikan (taraf signifikansi $< 0,05$) maka distribusi data berbeda dengan standar baku atau dinyatakan tidak normal. Sedangkan jika tidak terdapat perbedaan yang signifikan (taraf signifikansi $> 0,05$) maka distribusi data tidak berbeda dengan standar baku atau terdistribusi secara normal.

Berikut adalah hasil pengujian normalitas dengan uji Kolmogorov-Smirnov:

Tabel 2
Hasil Uji Normalitas dengan Kolmogorov-Smirnov:

		Unstandardized Residual
	N	31
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.31785143
Most Extreme Differences	Absolute	.125
	Positive	.125
	Negative	-.099
	Kolmogorov-Smirnov Z	.697
Asymp. Sig. (2-tailed)		.716

Sumber: data yang diolah dengan SPSS 16.0

Hasil pengujian membuktikan nilai taraf signifikansi dari Kinerja Perusahaan (a) sebesar 0,71,6. Nilai taraf signifikansi di atas 0,05 menunjukkan bahwa nilai residual tidak mempunyai perbedaan yang signifikan dengan nilai standar baku. Dengan demikian, data tersebut terdistribusi secara normal atau asumsi normalitas terpenuhi.

2. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas memiliki beberapa ketentuan dimana ketentuan dari VIF adalah jika $VIF > 10$ maka terdapat multikolinieritas. Namun jika $VIF < 10$ maka tidak terdapat multikolinieritas. Hasil pengujian tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 2
Hasil Uji Multikolinieritas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
Kepemilikan Institusional	.757	1.322
Kepemilikan Manajerial	.901	1.110
Komite Audit	.649	1.540
Komisaris Independen	.784	1.276

a. Dependent Variable: Kinerja Perusahaan

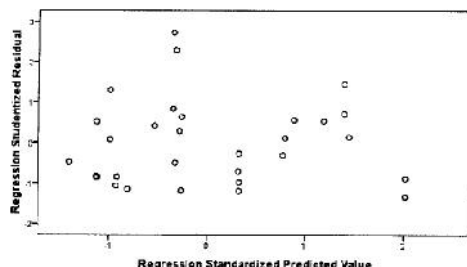
Sumber: data yang diolah dengan SPSS 16.0

Berdasarkan tabel diatas, hasil perhitungan nilai *tolerance* tidak menunjukkan bahwa ada variabel bebas yang memiliki nilai *tolerance* kurang dari 0,1 dan tidak ada satupun variabel independen yang memiliki VIF lebih dari 10. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak ada korelasi antar variabel bebas atau tidak terjadi multikolinieritas.

3. Uji Heterokedasitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Pada uji heterokedasitas, grafik yang ada berupa diagram pencar residual yaitu selisih antara nilai Y prediksi dengan Y observasi. Jika diagram scatterplot yang ada membentuk pola-pola tertentu yang teratur, regresi mengalami gangguan heterokedasitas. Jika diagram scatterplot tidak membentuk pola atau acak, regresi tidak mengalami gangguan heterokedastisitas.

Gambar 2
Uji Heterokedastisitas



Sumber: Gambar diolah dengan SPSS 16.0

Berdasarkan Gambar 2, dihasilkan bahwa diagram berpencar dan tidak menghasilkan suatu pola, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heterokedastisitas.

4. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi yang digunakan pada penelitian ini adalah pengujian Durbin-Watson (D-W). D-W memiliki ketentuan sebagai berikut:

- Jika $D-W > \text{batas atas (dU)}$, maka tidak ada autokorelasi.
- Jika $D-W < \text{batas bawah (dL)}$, maka terjadi autokorelasi.
- Jika $dL < D-W < dU$, maka tidak dapat diketahui terjadi autokorelasi atau tidak.

Tabel 4
Hasil Uji Autokorelasi

Model	Durbin-Watson
1	1.588

Sumber: data yang diolah dengan SPSS 16.0

Berdasarkan Tabel 4 di atas, menunjukkan bahwa nilai DW sebesar 1,588 lebih kecil dari batas atas (du) 1,7352 dan lebih besar dari batas bawah (dl) 1,1602, maka dengan demikian tidak terjadi autokorelasi.

Pengujian terhadap Hipotesis dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda. Analisis regresi berganda digunakan untuk menguji besar pengaruh komponen *Corporate Governance* yaitu, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, komite audit, dan dewan komisaris independen terhadap kinerja perusahaan sebagai variabel dependen.

Adapun hasil uji regresi linier berganda dapat dilihat pada Tabel Coefficient:

Tabel 5
Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-.838	.832		-1.008	.323

Kepemilikan Institusional	.385	.647	.120	.594	.557
Kepemilikan Manajerial	-104.787	1183.090	-.016	-.089	.930
Komite Audit	.610	.377	.352	1.619	.118
Komisaris Independen	2.244	.915	.485	2.453	.021

a. Dependent Variable: Kinerja Perusahaan

Sumber: data yang diolah dengan SPSS 16.0

Berdasarkan Tabel 5, diperoleh persamaan regresi linear berganda sebagai berikut:

$$Y = -0,838 + 0,385X_1 - 104,787X_2 + 0,610X_3 - 2,244X_4$$

Dimana:

Y : Kinerja Perusahaan (Tobin's Q)

X1 : Kepemilikan Institusional

X2 : Kepemilikan Manajerial

X3 : Komite Audit

X4 : Komisaris Independen

Persamaan regresi di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Konstanta bernilai -0,838 artinya bahwa Kinerja Perusahaan (Tobin's Q) bernilai -0,838 jika diasumsikan variabel independen bernilai nol.
- Koefisien regresi variabel Kepemilikan Institusional sebesar 0,385; artinya jika Kepemilikan Institusional mengalami kenaikan 1 satuan maka Kinerja Perusahaan (Tobin's Q) akan mengalami kenaikan sebesar 0,385 dengan asumsi variabel independen lain nilainya tetap.
- Koefisien regresi variabel Kepemilikan Manajerial sebesar -104,787; artinya jika Kepemilikan Manajerial mengalami kenaikan 1 satuan maka Kinerja Perusahaan (Tobin's Q) akan mengalami penurunan sebesar 104,787 dengan asumsi variabel independen lain nilainya tetap.
- Koefisien regresi variabel Komite Audit sebesar 0,610; artinya jika Komite Audit mengalami kenaikan 1 satuan maka Kinerja Perusahaan (Tobin's Q) akan mengalami peningkatan sebesar 0,610 dengan asumsi variabel independen lain nilainya tetap.
- Koefisien regresi variabel Komisaris Independen sebesar 2,244; artinya jika Komisaris Independen mengalami kenaikan 1 satuan maka Kinerja Perusahaan (Tobin's Q) akan mengalami peningkatan sebesar 2,244 dengan asumsi variabel independen lain nilainya tetap.

Dari Tabel 5 dapat disimpulkan bahwa variabel Kepemilikan Institusional (X1), Komite Audit (X3) dan Komisaris Independen (X4) mempunyai pengaruh positif terhadap Kinerja Perusahaan (Tobin's Q) sedangkan Kepemilikan Manajerial (X2) yang berpengaruh negatif terhadap Kinerja Perusahaan (Tobin's Q).

Pengujian hipotesis dilakukan dengan menguji nilai signifikansi dari pengaruh setiap variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen. Hasil pengujian hipotesis dapat dilihat pada tabel berikut:

- Hasil pengujian hipotesis 1, mengenai pengaruh kepemilikan institusional terhadap Kinerja Perusahaan menunjukkan nilai t sebesar 0,594 dengan

signifikansi sebesar 0,557. Nilai signifikansi pengujian tersebut lebih besar dari 0,05. Hal ini menandakan bahwa variabel kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap Kinerja Perusahaan. Dengan demikian, hipotesis 1 yang menyatakan “Kepemilikan institusional berpengaruh terhadap Kinerja Perusahaan” ditolak.

2. Hasil pengujian hipotesis 2 mengenai pengaruh kepemilikan manajerial terhadap Kinerja Perusahaan menunjukkan nilai t sebesar -0,089 dengan signifikansi 0,930. Nilai signifikansi tersebut lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa variabel kepemilikan manajerial tidak memiliki pengaruh terhadap Kinerja Perusahaan. Dengan demikian, hipotesis 2 yang menyatakan “Kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap Kinerja Perusahaan” ditolak.
3. Hasil pengujian hipotesis 3 mengenai pengaruh jumlah komite audit terhadap Kinerja Perusahaan menunjukkan nilai t sebesar 1,619 dengan signifikansi sebesar 0,118. Nilai signifikansi ini lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa variabel jumlah komite audit tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Kinerja Perusahaan.
4. Dengan demikian, hipotesis 3 yang menyatakan “Jumlah komite audit tidak berpengaruh terhadap Kinerja Perusahaan” ditolak. Hasil pengujian hipotesis 4 mengenai pengaruh proporsi dewan komisaris independen terhadap Kinerja Perusahaan menunjukkan nilai t sebesar 2,453 dengan signifikansi sebesar 0,021. Nilai signifikansi pengujian tersebut lebih kecil dari 0,05. Hal ini menandakan bahwa variabel proporsi dewan komisaris independen memiliki pengaruh signifikan terhadap Kinerja Perusahaan. Dengan demikian, hipotesis 4 yang menyatakan “Proporsi dewan komisaris independen berpengaruh terhadap Kinerja Perusahaan” diterima.

Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi digunakan kemampuan mengukur model dalam untuk menerangkan variasi variabel independen. Berikut adalah hasil perhitungan koefisien determinasi hipotesis.

Tabel 6
Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.452 ^a	.204	.082	.34143

Sumber: data yang diolah dengan SPSS 16.0

Berdasarkan Tabel 6, pada koefisien determinasi model regresi diperoleh nilai *adjusted R²* sebesar 0,082. Hal ini berarti bahwa 8,2% variasi Kinerja Perusahaan dapat dijelaskan oleh komite audit, dewan komisaris independen, kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional, sedangkan sisanya dapat dijelaskan oleh faktor-faktor lain selain variabel independen tersebut.

Pembahasan

Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Kinerja Perusahaan

Hasil pengujian terhadap hipotesis 1 menunjukkan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap Kinerja Perusahaan. Hal ini dapat dilihat dari nilai koefisien kepemilikan institusional yang sebesar 0,385 serta nilai t sebesar 0,594 dengan tingkat signifikansi 0,557. Hal ini menunjukkan bahwa kepemilikan institusional tidak dapat memberikan pengaruh terhadap Kinerja Perusahaan, artinya dengan adanya kepemilikan saham oleh pihak institusi tidak mampu meningkatkan Kinerja Perusahaan.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan Praditia (2010) yang membuktikan bahwa kepemilikan institusional tidak memiliki pengaruh terhadap nilai perusahaan. Pengawasan yang dilakukan oleh pemegang saham institusi tidak berpengaruh terhadap harga saham perusahaan. Manajer terkadang melakukan tindakan yang luput dari pengawasan pemegang saham institusi.

Oleh karena itu, agar dapat meningkatkan kinerja perusahaan tanpa mengabaikan tujuan perusahaan yaitu mensejahterakan para pemegang saham, maka manajer harus merasakan bagaimana menjadi pemilik perusahaan yang membutuhkan kesejahteraan tanpa mengabaikan kinerja perusahaan.

Pengaruh Kepemilikan Manajerial Terhadap Kinerja Perusahaan

Pengujian hipotesis 2 yang merupakan pengujian antara kepemilikan manajerial terhadap Kinerja Perusahaan menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap Kinerja Perusahaan. Hal ini dapat dilihat dari nilai koefisien yang sebesar -104,787 serta nilai t sebesar -0,089 dengan signifikansi 0,930. Hal ini menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap hal-hal yang dapat mempengaruhi Kinerja Perusahaan. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa perusahaan sampel penelitian tidak menggunakan kepemilikan manajerial untuk meningkatkan Kinerja Perusahaan.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Praditia (2010) yang menyatakan bahwa kepemilikan manajerial secara parsial tidak mempunyai pengaruh terhadap Kinerja Perusahaan. Semakin besar kepemilikan manajerial dalam perusahaan, maka informasi laporan keuangan akan cepat diketahui oleh pemilik perusahaan. Hal ini dikarenakan selain sebagai pemilik, manajer juga sebagai pengelola perusahaan. Sedangkan, pihak lain dapat mengetahui informasi tersebut setelah laporan keuangan perusahaan dipublikasikan. Hal ini mencerminkan bahwa keputusan pemilik merupakan keputusan manajer, sehingga manajer dapat membuat keputusan-keputusan yang berkaitan dengan Kinerja Perusahaan.

Pengaruh Komite Audit Terhadap Kinerja Perusahaan

Pengujian hipotesis 3 yang merupakan pengujian komite audit terhadap Kinerja Perusahaan menunjukkan bahwa variabel tersebut tidak berpengaruh terhadap Kinerja Perusahaan. Hal ini dapat dilihat dari nilai koefisien variabel komite audit yang sebesar 0,610 serta nilai t sebesar 1,619 dengan signifikansi sebesar 0,118. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah dari komite audit yang besar bukan merupakan laminan untuk meningkatkan Kinerja Perusahaan.

Komite audit berfungsi untuk meningkatkan mutu dan kredibilitas dari laporan keuangan agar tidak memberikan informasi yang dapat menyesatkan pihak pemegang saham dalam mengambil keputusan investasi.

Dengan demikian, hasil penelitian ini dapat membuktikan bahwa kualitas auditor tidak dapat berperan sebagai mekanisme *Corporate Governance* yang dapat meningkatkan Kinerja Perusahaan.

Pengaruh Proporsi Dewan Komisaris Independen Terhadap Kinerja Perusahaan

Hasil pengujian terhadap hipotesis 4 menunjukkan bahwa komisaris independen berpengaruh terhadap Kinerja Perusahaan. Hal ini dapat dilihat dari nilai koefisien komisaris independen yang sebesar 2,244 serta nilai t sebesar -2,453 dengan signifikansi sebesar 0,021. Hal ini menunjukkan bahwa komisaris independen dapat memberikan pengaruh terhadap Kinerja Perusahaan, artinya dewan komisaris independen mampu meningkatkan Kinerja Perusahaan.

Jumlah komisaris independen yang tinggi bukan merupakan jaminan bahwa kinerja perusahaan akan semakin baik, sehingga pasar menganggap keberadaan komisaris independen bukanlah faktor yang dijadikan pertimbangan dalam mengapresiasi Kinerja Perusahaan. Semakin besar jumlah komisaris independen dalam suatu perusahaan, maka akan semakin meningkatkan Kinerja Perusahaan.

Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi ketidaksignifikan pengaruh kepemilikan manajerial, kepemilikan institutional, dan komite audit terhadap Kinerja Perusahaan. Faktor-faktor tersebut bisa berasal dari faktor ekonomi, baik makro ekonomi maupun mikro ekonomi dan faktor sosial. Faktor ekonomi terdiri dari pertumbuhan ekonomi, inflasi, suku bunga, tingkat harga saham produk dan jasa yang dihasilkan, regulasi pemerintah, dan krisis keuangan dunia. Faktor sosial terdiri dari tanggung jawab sosial, kepercayaan dan gaya hidup yang berkembang di masyarakat. Hal-hal inilah yang menjadi pertimbangan investor dalam memberikan persepsi terhadap Kinerja Perusahaan.

Cepat lambatnya pertumbuhan ekonomi akan menjadi pertimbangan dan membuat para investor berpikir panjang untuk menginvestasikan modalnya. Investor biasanya akan mencari negara-negara yang memiliki tingkat pertumbuhan yang tinggi karena diharapkan mendatangkan returnnya lebih terjamin. Return yang terjamin akan menarik para investor untuk berinvestasi dan menjamin bahwa suatu perusahaan akan menguntungkan bagi investor ke depannya. Dampak inflasi yang cukup tinggi membuat kinerja perusahaan menjadi turun. Inflasi membuat ketidakstabilan dari segi pertumbuhan ekonomi karena kenaikan inflasi belum tentu diikuti kenaikan pendapatan masyarakat.

Penurunan inflasi ini terjadi karena adanya campur tangan dari Bank Indonesia (BI). BI sebagai bank sentral memiliki wewenang dalam menentukan kebijakan moneter dengan cara menaikkan suku bunga untuk menurunkan inflasi. Kebijakan moneter ini hanya berpengaruh terhadap kondisi makro ekonomi.

Regulasi pemerintah dari segi penentuan pajak atas transaksi pasar modal. Calon investor akan berusaha mencari negara dengan pengenaan pajak yang paling rendah. Meskipun kinerja keuangan perusahaan baik, hal itu tidak akan mampu meyakinkan para investor untuk berinvestasi diakibatkan pajak yang

terlalu tinggi. Kualitas produk dan jasa yang buruk akan membuat kinerja perusahaan menjadi buruk seperti yang terjadi pada kasus PT Aqua Golden Mississippi dimana masyarakat mengeluhkan ada beberapa galon air yang mengandung sejenis kertas. Hal ini dapat mempengaruhi berbagai anggapan masyarakat mengenai kualitas produk yang dihasilkan. Hal itu berdampak pada berkurangnya investor pada perusahaan tersebut sehingga harga saham pun juga ikut merosot.

Harga saham menjadi indikator baik buruknya nilai suatu perusahaan. Perubahan yang terlalu fluktuatif pada harga saham dapat mempengaruhi pertimbangan calon investor dalam menginvestasikan modalnya pada perusahaan. Para calon investor tidak mau mengambil resiko terhadap perusahaan yang tingkat harga sahamnya fluktuatif.

Tanggung jawab sosial yang dilaksanakan secara baik akan membuat image dan nilai dari suatu perusahaan juga baik. Namun jika tanggung jawab sosial dilakukan secara tidak bertanggung jawab dengan tidak memperhatikan dampak pada lingkungan sekitar akan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan tersebut. Hal ini terjadi pada PT Tirta Investama yang merupakan bagian dari PT Aqua Golden Mississippi di mana terjadi pembangunan pabrik air mineral yang tidak melihat kepentingan masyarakat sekitar. Hal ini meuai protes dari masyarakat sekitar sebab mereka menjadi kekurangan air untuk kegiatan sehari-hari mereka yang bekerja sebagai petani. Para calon investor juga melihat dari hal tersebut sebagai pertimbangan mereka dalam beri nvestasi terhada p suatu perusahaan.

Berdasarkan uraian tersebut dapat diartikan bahwa pada tahun 2010-2012 kepemilikan manajerial, kepemilikan institutional dan komite audit tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Kinerja Perusahaan atau Tobin's Q. Hipotesis 1, Hipotesis 2, dan Hipotesis 3 untuk penelitian tahun 2010-2012 ditolak. Hal ini disebabkan karena beberapa faktor lain yang berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan.

Penutup

Penelitian ini menguji pengaruh mekanisme *Corporate Governance* yang diproksi dengan kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, komisaris independen, dan komite audit terhadap nilai perusahaan. Dari empat hipotesis yang diajukan, hanya hipotesis 4 yang diterima. Berikut adalah kesimpulan yang dapat diperoleh dari penelitian ini:

1. Kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa kepemilikan saham oleh para pihak institusi tidak mampu meningkatkan Kinerja Perusahaan.
2. Kepemilikan manajerial tidak berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial bukan merupakan cara untuk meningkatkan Kinerja Perusahaan.
3. Komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah komite audit bukan merupakan jaminan untuk meningkatkan Kinerja Perusahaan.

4. Dewan komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa proporsi dewan komisaris independen dapat tidak memberikan perubahan terhadap Kinerja Perusahaan.

Adapun saran yang dapat diberikan untuk berbagai pihak dan penelitian sejenis berikutnya yaitu:

1. Bagi manajemen, manajemen memperhatikan komponen *Corporate Governance* lainnya seperti sistem intensif manajemen, kualitas auditor dan sekretaris perusahaan serta faktor-faktor lainnya yang berpengaruh terhadap Kinerja Perusahaan seperti, tingkat inflasi, regulasi pemerintah dan lain sebagainya.
2. Investor perlu memperhatikan komponen komisaris independen dan komponen *Corporate governance* lainnya serta faktor-faktor lainnya yang berpengaruh terhadap Kinerja Perusahaan sebagai bahan pertimbangan dalam beri investasi.
3. Bagi masyarakat dan pihak yang akan melakukan penelitian lain yang sejenis tidak menilai bahwa hasil penelitian ini akan sama dengan penelitian lainnya. Penelitian ini sebaiknya digunakan sebagai perbandingan dan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya.
4. Penelitian selanjutnya perlu mengidentifikasi komponen *Corporate Governance* lain untuk mengetahui bagaimana pengaruhnya terhadap Kinerja Perusahaan, seperti sistem insentif untuk manajemen, pertemuan RUPS, kualitas auditor dan lain sebagainya.
5. Menggunakan model lain yang lebih tepat dalam menghitung Kinerja Perusahaan yang lebih sesuai untuk diterapkan di Indonesia.
6. Menggunakan sampel perusahaan yang tidak hanya pada perusahaan LQ45 saja, tetapi dapat dikembangkan dengan menggunakan sampel dari kelompok perusahaan lain yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
7. Memperpanjang periode tahun pengamatan dengan periode atau rentang waktu yang berbeda.
8. Menggunakan variabel lainnya seperti tingkat inflasi, ROE, ROA, CSR, dan lain sebagainya untuk penelitian sejenis berikutnya.

Daftar Pustaka

- Ade Kusuma, Sambas. 2005. Pengaruh Penerapan *Corporate Governance* terhadap Kinerja Perusahaan.
- Emirzon, Joni. Regulatory Driven dalam Implementasi Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* pada Perusahaan di Indonesia. Jurnal MM Vol.4 No. 8.
- Fitriya Ningsih, Anik. 2009. Pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap Kinerja Perusahaan.
- Ghozali, Imam. 2005. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS. Edisi 3. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

- Hasibuan, Malayu, SP. 2005. Manajemen Sumber Daya Manusia. Edisi Revisi Bumi Aksara. Jakarta.
- Lestariningsih. 2008. Penerapan *Good Corporate Governance* dalam Pengembongon Perusohoan Publik. Spirit Publik Vol. 4 No-2 Ha1 1,33-122.
- Mangkunegara. A.A. Anwar Prabu. 2007. Monajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan Cetakan Ketujuh. PT. Remaja Rosdakarya. Bandung
- Pranata, Yudha. 2007. Pengaruh Penerapan GCG Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan, UII.
- Prasetyantoko. A, *Corporate Governance*, Pendekatan Institusional, Gramedia Pustaka Utama. 2008.
- Surya Indra dan Ivan. 2008. Penerapan *Good Corporate Governance*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta.
- Wulandari, Ndaruningpuri 2006. Pengaruh Indikator Mekanisme *Corporate Governance* Terhadap Kinerja Perusahaan Publik Indonesia. Vol. 1